

## PENGARUH KOMPETENSI PETUGAS, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

**Evi Ratna Yuliasuti**  
Yuliasutievi48@gmail.com  
**Ikhsan Budi Riharjo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*Nowadays, the government system gives the authority to the local government to develop their own area. The implementation of village development with their own resources from local fund is obtains from APBN, with a great nominal. Nevertheless, the greater the local fund, the opportunity of fraud experience is also high. Therefore, it required an accountability for the local fund management in the implementation of village development. The accountability is effected by the officer competency, internal control, and a clear budget target. This research aimed to examine the effect of officer competency, internal control, and a clear budget target on the local fund management's accountability at the district of Sidoarjo. The research method used quantitative and the data analysis technique used multiple linear regressions. The sample of this research used 48 vilages. At the same time, the data collection method of this research used a questionnaire. This research shower that officer competency had a effect on village fund management's accountability. The internal control had a don't effect on village fund management's accountability and the clarity of budged target had a effect on village fund management's accountability.*

*Keywords: officer competency, internal control, clarity of budged target and accountability.*

### ABSTRAK

Pada sistem pemerintahan sekarang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membangun daerahnya sendiri. Pelaksanaan pembangunan desa sendiri dananya berasal dari dana desa yang didapatkan dari APBN, yang nominalnya cukup besar. Namun dengan semakin besarnya dana desa, ternyata peluang untuk menyelewengkan dana desa juga cukup besar. Sehingga perlu adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh kompetensi petugas, pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kompetensi petugas, pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kabupaten sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dan teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Sampel pada penelitian ini berjumlah 48 desa. Metode pengumpulan data pada penelitian yaitu menggunakan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kompetensi petugas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, pengendalian internal berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: kompetensi petugas, pengendalian internal, kejelasan sasaran dan akuntabilitas.

### PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka hingga orde baru sistem pemerintahan Indonesia menggunakan pemerintahan sentralisasi, dimana pemerintahan pusat yang berperan dalam pembangunan. Setelah berakhirnya orde baru, saat ini sistem pemerintahan Indonesia telah berubah dari pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi, pemerintahan daerah telah diberikan kewenangan daerah untuk membangun daerahnya sendiri. Penggunaan sistem pemerintahan secara desentralisasi sama dengan tujuan demokrasi yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adanya desentralisasi ini dapat terwujudnya

keputusan publik secara demokrasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

Berlangsungnya desentralisasi dapat memberikan kesadaran pentingnya kemandirian daerah yang berdasarkan pada pemberdayaan potensi lokal. Saat ini kebijakan pemerintah yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, namun sebenarnya secara esensi kemandirian tersebut dimulai pada level pemerintah tingkat bawah yaitu desa. Dengan memberikan otonomi desa diharapkan memberikan pengakuan terhadap lokalitas desa itu sendiri dan mampu membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat desa dapat merasakan dampak secara langsung pembangunan dan dapat menikmati pelayanan publik yang baik. Dengan terwujudnya otonomi desa maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi desa agar menjadi maju, mandiri, kuat dan demokratis dalam menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.

Pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalamnya membahas tentang pemilihan kepala desa, pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa dan proses pembangunan desa. Berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa yang berupa hasil asset, hasil usaha, partisipasi, swadaya, gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya, pendapatan alokasi dari APBN, pendapatan dari pembagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan dari alokasi dana desa yang merupakan dana perimbangan dari kabupaten/kota, pendapatan dari bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, pendapatan dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, pendapatan dari lain-lain yang sah.

Pendapatan ini dipergunakan oleh pemerintahan desa untuk menjalankan kewenangannya yang meliputi pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan desa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, dalam pelaksanaan pembangunan desa sendiri membutuhkan biaya yang paling besar. Pembangunan Desa dapat dilakukan menggunakan dana yang berasal dari alokasi APBN yang selanjutnya disebut Dana Desa (DD). Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dana desa menjadi sumber pendapatan desa yang paling besar dari sumber pendapatan yang lainnya.

Berdasarkan data kementerian Keuangan RI setiap tahun pemerintahan pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar, pada tahun 2015 pemerintah menganggarkan senilai Rp 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima senilai Rp 280 juta. Pada tahun 2016, pemerintah mengalokasikan lebih besar lagi yaitu senilai Rp 46, 98 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima senilai Rp 628 juta dan di tahun 2017 pemerintah kembali meningkatkan anggaran dana desa yang menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima Rp 800 juta, yang setiap tahunnya akan selalu meningkat.

Namun dengan semakin besarnya dana desa, ternyata peluang untuk menyelewengkan dana desa juga cukup besar. Berdasarkan berita yang dirilis oleh Merdeka.com tanggal 29 Agustus 2017, tim penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo memproses kepala desa Glagah Arum, Kecamatan Porong Sidoarjo. Pada kasus ini kepala desa Glagah Arum telah melakukan tindak pidana kasus korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa senilai 225 Juta. Anggaran yang senilai 400 juta itu seharusnya digunakan untuk biaya operasional desa termasuk untuk gaji karyawan setempat, namun anggaran itu justru dipergunakan secara pribadi oleh kades senilai 225 juta. Sehingga karena telah melakukan tindak pidana korupsi kades telah dikenai pasal 2 ayat 2 jo pasal 18 Undang-Undang tindak pidana korupsi empat tahun penjara. Penyelewengan penggunaan dana desa yang ditangani oleh aparat penegak hukum untuk

tahun 2018 berjumlah 826 kasus (republika.co.id). Kasus penyelewengan pada penggunaan dana desa begitu banyaknya, dapat menimbulkan keraguan pada integritas pemerintahan desa dalam menjalankan kewajibannya untuk pembangunan desa tanpa terjadi tindak kasus korupsi. Sehingga perlu adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam menjalankan pembangunan desa yang merupakan fokus masyarakat untuk merasa yakin bahwa pemerintahan desa melaksanakan pembangunan dengan baik dan tanpa penyelewengan dana desa.

Akuntabilitas sendiri yaitu sebuah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan seorang pemimpin kepada pihak yang memiliki hak/yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Hidayatullah dan Herdjino (2014) berpendapat bahwa, pemerintah selaku pengguna dana publik agar dapat memenuhi akuntabilitas yaitu harus memperhatikan beberapa hal antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Pada penelitian Cheng, 2002 (dalam Widyatama *et al.*, 2017:2) menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh para aparatur pemerintahan turut mempengaruhi akuntabilitas pemerintahan desa. Kurtz dan Schrank, 2007 (dalam Widyatama *et al.*, 2017:2) juga memberikan pendapatnya yang menyebutkan bahwa faktor yang menentukan akuntabilitas suatu pemerintahan adalah implementasi tata pemerintah yang baik.

Kompetensi sering diartikan sebagai keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Menurut McClelland, 1987 (dalam Sagala, 2009:840) pengertian kompetensi yaitu seseorang yang memiliki suatu karakteristik yang berdampak langsung pada kinerja yang sangat baik. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokoknya, maka semakin bagus kualitas kinerja yang dihasilkan (Achmad,2003). Pada penelitian terdahulu dari penelitian Mada *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Namun pada penelitian yang lain Widyatama *et al.*, (2017) yang berjudul pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas mengelola alokasi dana desa, menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan.

Selain kompetensi petugas, pengendalian internal juga merupakan faktor penting akuntabilitas. Pengendalian internal yaitu suatu perbuatan, usaha dan kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan dan semua pegawai agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan cara pelaporan keuangan yang baik, tertib pada peraturan perundang undangan, kegiatan yang efektif dan efisien dan keamanan asset negara (Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008). Sistem pengendalian internal sangat mempengaruhi tingkat kualitas akuntabilitas suatu organisasi. Pada penelitian Yesinia *et al.*, (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Demikian juga Widyatama *et al.*, (2017) yang berjudul pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas mengelola alokasi dana desa, menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Namun pada penelitian Karmila *et al.*, (2014) yang berjudul pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Kejelasan sasaran sangat penting bagi organisasi untuk mempermudah dalam mempertanggungjawabkan kegagalan dan keberhasilan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian anggaran adalah suatu rancangan rencana yang disajikan secara kuantitatif dalam satuan mata uang yang memiliki jangka waktu tertentu, yang perlu diperhatikan dalam suatu penganggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka target-target yang diharapkan oleh organisasi dapat disusun dengan baik. Dalam pemerintahan desa kejelasan anggaran akan memberikan hasil

yang maksimal dalam penggunaan anggaran yang kemudian aparat desa akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa menurut (Judarmita dan Supadmi, 2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang digunakan. Jadi pada penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengambilan data wawancara secara mendalam, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan alat ukur kuesioner yang diambil dengan menggunakan metode survei. Di samping itu masih perlunya dilakukan penelitian ini karena pada beberapa penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten pada hubungan antar variabel, ketidak konsisten dari penelitian sebelumnya itu menjadi ruang untuk dilakukan peninjauan kembali yang berkaitan dengan variabel-variabel ini namun diterapkan pada objek yang berkaitan dengan penggunaan dana desa di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah kompetensi petugas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?, (2) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?, (3) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu (1) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi petugas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## TINJAUAN TEORITIS

### Kompetensi Petugas

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai negeri sipil yang berupa keterampilan, kemampuan dan sikap perilaku yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien dan profesional (Permen No 108 Tahun 2017). Menurut Rudana, 2005 (dalam Widyatama *et al.*, 2017:6), kompetensi mengacu kepada pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki dengan standar tertentu. Kompetensi dapat ditinjau dari tindakan yang dimiliki dari kombinasi tiga hal tersebut. Kompetensi ini dapat dilihat dari sektor pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi di dalam setting pekerjaan. Menurut Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga kompetensi utama pembentuk kompetensi, yang meliputi pengetahuan, Keterampilan individu, dan sikap kerja.

### Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah suatu alat yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Munandar, 2001(dalam Silalahi, 2017:20) menyatakan tentang definisi suatu anggaran yaitu suatu perencanaan yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang di mana dinyatakan dalam suatu bentuk unit atau kesatuan moneter yang berlaku dalam jangka waktu yang akan datang. Pengertian anggaran sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu perencanaan untuk mengendalikan laba menyeluruh yang didefinisikan secara luas sebagai suatu susunan anggaran yang sistematis dan formal untuk perencanaan pengendalian tanggung jawab manajemen dan koordinasi Welsch, 2000 (dalam Silalahi, 2017:23).

### **Akuntabilitas**

Menurut Krina, 2003 (dalam Azhar, 2017:28) bahwa akuntabilitas secara garis besar berhubungan dengan tugas dari aparat pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akuntabilitas publik meminta adanya batasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi, karena pemerintah memiliki tanggungjawab dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai. Akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah nilai dari menjalankan pelayanan dengan dasar penilaian eksternal yang dimiliki oleh *stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap pelayanan tersebut.

### **Perumusan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kompetensi Petugas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Kompetensi sumber daya manusia yaitu suatu individu, organisasi, sistem yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah dapat tersaji dengan baik dan andal apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Laporan keuangan daerah tersaji dengan baik dapat meningkatkan terwujudnya akuntabilitas yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah menurut Wati *et al.*, (2014). Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kompetensi Petugas Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### **Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pengendalian internal adalah suatu prosedur dan suatu sistem yang pada organisasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dilakukan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengendalian internal di lingkungan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan cara melakukan perbaikan dan evaluasi pengendalian internal, proses tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa. Sistem Pengendalian internal pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Kejelasan sasaran anggaran yaitu sejauh mana tujuan anggaran dibuat secara spesifik dan jelas dengan tujuan agar anggaran yang telah disusun dapat dimengerti oleh pihak yang berkepentingan sehingga akuntabilitas dapat terlaksana. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, maka akan mempermudah dalam mempertanggungjawabkan kegagalan dan keberhasilan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Judarmita dan Supadmi (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas dana desa. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Pada Akuntabilitas Dana Desa

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian Dan Gambaran Dari Populasi (Objek) Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan desain penelitian studi Pengujian Hipotesis untuk menguji pengaruh antar variabel. Populasi yang dalam penelitian ini adalah pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 18 kecamatan, 31 kelurahan dan 322 desa. Untuk penelitian ini populasi yang digunakan yaitu 322 desa, dikarenakan yang menerima dana desa yaitu 322 desa.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling yaitu metode pengambilan sampling dengan kriteria tertentu, Untuk pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu sesuai dengan surat izin riset yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Sidoarjo yang meliputi 3 kecamatan yang terdiri dari 48 desa yang setiap desa yang menjawab kuesioner yaitu kepala desa dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dikarenakan bertugas dalam pengelolaan dana desa.

### **Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengambilan data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jawaban diperoleh dari responden atas beberapa item pertanyaan tentang pengaruh kompetensi sistem pengendalian intern dan kejelasan sasaran anggaran. Data primer yang diperoleh menggunakan teknik kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis kepada narasumber dan responden berkaitan dengan aspek penting yang berhubungan dengan variabel penelitian

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yaitu Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan Desa. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh kompetensi petugas, pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran.

#### **Definisi Operasional Variabel**

Untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan variabel-variabel penelitian yang telah diidentifikasi, maka perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut: (1) Kompetensi Petugas (X1) merupakan suatu kemampuan dimiliki manusia untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugas yang diberikan, dengan bekal pelatihan, pengalaman dan pendidikan. Indikator untuk menilai yaitu: (a) Pengetahuan, (b) Keterampilan Individu, (c) Pelatihan, (d) Pendidikan (e) Pengalaman, (2) Pengendalian Internal (X2) ialah suatu upaya pemerintah desa untuk melakukan pengawasan secara terus menerus untuk memberikan

keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator untuk menilai yaitu: (a) Kepatuhan kepada hukum yang berlaku, (b) Efisiensi dan efektifitas operasi, (c) Keandalan data interval laporan, (3) Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) Munandar, 2001 (dalam Silalahi, 2017:20) menyatakan tentang definisi suatu anggaran yaitu suatu perencanaan keuangan/anggaran yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang memiliki sasaran yang jelas dan terukur. Indikator untuk menilai yaitu: (a) Tujuan, (b) Kinerja, (c) Standar, (d) Sasaran prioritas, (e) Tingkat kesulitan, (4) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah aparat yang memiliki tugas untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan dan memberikan sarana prasarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Indikator untuk menilai yaitu: (a) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, (b) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, (c) Tersedianya sarana dan prasarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah, (d) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas data bermanfaat untuk memberikan penilaian kuesioner dalam mengukur variabel yang diinginkan peneliti, karena variabel ilmu sosial bersifat abstrak. Semakin tinggi suatu validitas variabel maka tes tersebut akan semakin valid. Berdasarkan Masrun, 1979 (dalam Solimun, 2005), indikator dinyatakan valid apabila: (a) Jika  $r > 0,3$ , maka butir atau variabel  $r$  hasil tersebut valid, (b) Jika  $r$  hasil  $< 0,3$ , maka butir atau variabel  $r$  hasil tersebut tidak valid. Suatu kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dasar pengambilan keputusan, menurut Solimun (2005:14): (a) Jika  $\alpha \geq 0,6$ , maka butir atau variabel tersebut reliabel, (b) Jika  $\alpha < 0,6$ , maka butir atau variabel tersebut tidak reliabel.

### Teknik Analisis Data

#### Uji normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual ( $\mu$ ) memiliki distribusi normal. Uji Normalitas menggunakan dua cara yaitu metode grafik dan *Kolmogorov Smirnov Test*. Metode Grafik salah satu cara untuk menguji normalitas data yaitu dengan metode grafik (Normal P-Plot) dimana deteksi asumsi model ini dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. *Kolmogorov Smirnov Test* adalah membandingkan nilai signifikan dengan *level of significant* yang dipilih. Apabila nilai signifikan lebih besar daripada *level of significant*, maka asumsi normalitas terpenuhi, sedangkan apabila nilai signifikan kurang atau lebih kecil dari *level of significant*, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi (Ghozali,2006:151).

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ghozali (2009:95), mengemukakan bahwa untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi yaitu Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *tolerance* di atas 0,1 dan mempunyai nilai VIF di bawah 10 ( $VIF < 10$ ).

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan dua cara yaitu grafik plot dan Korelasi Spearman. Pada grafik plot deteksi dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatter plot* antara ZPRED dan ZRESID yang mana, sumbu y adalah variabel tergantungan dan telah di standarisasi. Menurut Ghozali (2005:126), dasar pengambilan keputusan adalah (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, (b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Korelasi Spearman menghubungkan nilai residual (*Unstandardized residual*) dengan masing-masing variabel independen. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan ketentuan, jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139-159).

### Analisis Model Regresi Linier berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda karena variabel independen dalam penelitian berjumlah tiga sehingga teknik ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan seberapa besar pengaruh antara variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Persamaan dari pada penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 KP + \beta_2 PI + \beta_3 KSA + e$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas pengelolaan dana desa
- $\beta_1 - \beta_4$  : Koefisien regresi masing-masing variabel
- KP : Kompetensi Petugas
- PI : Pengendalian Internal
- KSA : Kejelasan Sasaran Anggaran
- a : konstanta

### Uji Model

#### Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011: 68). Data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu: (a)  $H_0$  ditolak, apabila nilai signifikan F kurang dari tingkat signifikan 0,05 (b)  $H_0$  diterima, apabila nilai signifikan F lebih dari tingkat signifikan 0,05.

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berada pada jarak antara 0 sampai dengan 1. Apabila pemilihan variabel sudah benar dan bila menghasilkan  $R^2$  tinggi mendekati 1 berarti semakin baik model regresi tersebut dalam menjelaskan variabilitas variabel bebas (Dahlan, 2012: 8).

**Uji Hipotesis**  
**Uji T**

Untuk menguji hipotesis dan melihat pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel tergantung, dilakukan uji individu/ uji t. Langkah-langkah untuk melakukan uji t yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi t dengan 0,05, Ghozali (2013: 98) menyatakan bahwa bila signifikansi  $t \leq 0,05$  dari arah koefisien sesuai dengan hipotesis penelitian, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Validas**

Uji validitas data bermanfaat untuk memberikan penilaian kuesioner dalam mengukur variabel yang diinginkan peneliti, karena variabel ilmu sosial bersifat abstrak. Dari Hasil perhitungan menunjukkan *r* mempunyai nilai lebih dari 0,3 sehingga seluruh variabel bebas yaitu kompetensi petugas, pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran dan variabel terikat akuntabilitas pengelolaan dana desa mempunyai validitas yang baik.

**Uji Realibilitas**

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan daftar pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner (Gumilar, 2007:24). Menurut Ghozali (2009), uji reliabilitas digunakan untuk menentukan konsistensi pengukuran.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Realibilitas**

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Kompetensi petugas	0,867	Reliabel
Pengendalian internal	0,881	Reliabel
Kejelasan sasaran anggaran	0,838	Reliabel
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	0,813	Reliabel

Sumber: data hasil kuesioner diolah, 2018

Hasil perhitungan menunjukkan *Cronbach's Alpha* mempunyai nilai lebih dari 0,6 sehingga seluruh variabel mempunyai reliabilitas yang baik.

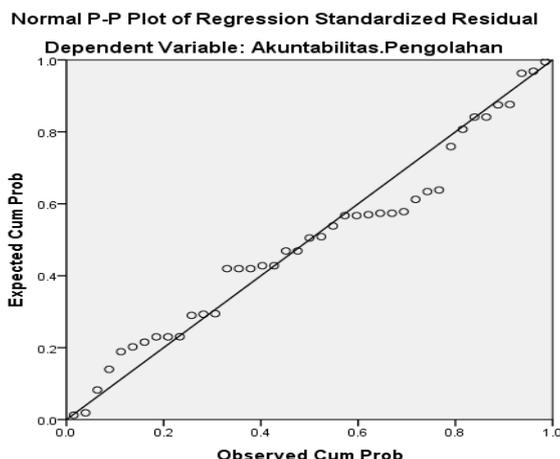
**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual ( $\mu$ ) memiliki distribusi normal. Uji Normalitas menggunakan dua cara yaitu *Kolmogrov-Smirnov Test* dan *P- Plot*, hasil uji normalitas dapat dilihat di bawa ini:

**Tabel 2**  
**Kolmogrov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.21937711
	Absolute	.137
Most Extreme Differences	Positive	.137
	Negative	-.100
Kolmogorov-Smirnov Z		.876
Asymp. Sig. (2-tailed)		.427

Sumber: data hasil kuesioner diolah, 2018



Gambar 1  
Grafik P- Plot

Sumber: data hasil kuesioner diolah, 2018

Setelah dilakukan pengujian ternyata nilai sig. 0,428 yang nilai sig. > 0,05 dan semua data terdistribusi secara normal, sebaran data berada disekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolonieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Hasil uji multikolenieritas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3  
Hasil Uji Multikolenieritas Variabel Bebas

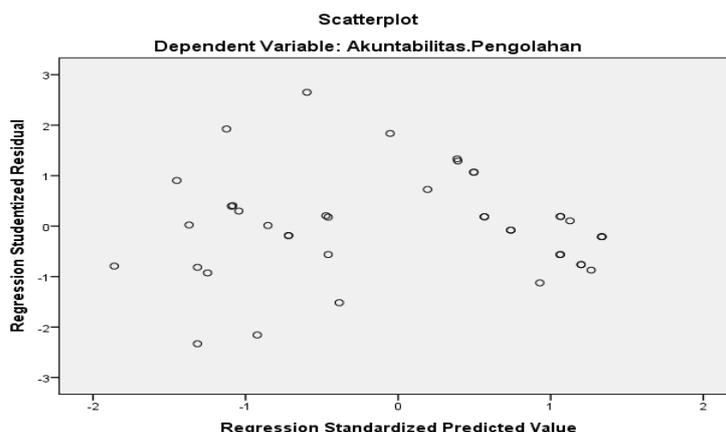
Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kompetensi Petugas	0,525	1.903	Bebas Multikol
Pengendalian Internal	0,236	4.241	Bebas Multikol
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,329	3.036	Bebas Multikol

Sumber: data hasil kuesioner diolah, 2018

Dalam pengujian asumsi klasik terhadap analisis regresi berganda menyatakan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikol atau non multikol karena nilai VIF dari masing-masing variabel kompetensi petugas, pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran < 10 jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolenieritas. Nilai tolerance juga > 0,1 sehingga dapat dikatakan penelitian ini bebas multikolenieritas.

**Uji Heterokeditas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heterokedastisitas ditunjukkan melalui gambar sebagai berikut:



**Gambar 2**  
**Grafik Scatterplot**  
Sumber: data hasil kuesioner diolah, 2018

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa model terjadi gejala homokedastisitas dikarenakan tidak membentuk pola tertentu, sehingga variabel terikat benar - benar hanya dijelaskan oleh variabel bebas.

**Analisis Model Regresi Linier Berganda**

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi dilakukan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara persial variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.935	.416		2.250	.030		
KP	.221	.088	.316	2.502	.017	.525	1.903
PI	.182	.174	.197	1.046	.302	.236	4.241
KSA	.419	.154	.433	2.714	.010	.329	3.036

a. Dependent Variable: Akuntabilitas.Pengolahan

Sumber: data hasil kuesioner diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas didapatkan rumusan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,935 + 0,221 KP + 0,182 PI + 0,419 KSA + e$$

Dalam perhitungan menunjukkan semua variabel bebas memiliki koefisien bertanda positif sehingga memiliki makna: (1) Koefisien regresi pada  $\beta_1$  Kompetensi Petugas (KP) sebesar 0,221 menunjukkan bahwa variabel kompetensi petugas menunjukkan arah hubungan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (2) Koefisien regresi pada  $\beta_2$  Pengendalian Internal (PI) sebesar 0,182 menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal menunjukkan arah hubungan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (3)

Koefisien regresi pada  $\beta_3$  Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA) sebesar 0,419 menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan arah hubungan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### Uji Model

#### Uji F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji.

**Tabel 5**  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.275	3	1.425	27.392	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1.925	37	.052		
	Total	6.201	40			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengolahan

b. Predictors: (Constant), Sasaran Anggaran, Kompetensi Petugas, Pengendalian Internal

Sumber: data hasil kuesioner diolah, 2018

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F adalah sebesar 27,392 dengan nilai signifikan 0,000, yang dimana nilai signifikan  $< 0,05$  sehingga model regresi dapat digunakan dalam memprediksi variabel independen.

#### Uji Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi (*R Square*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 6**  
Hasil Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.830 <sup>a</sup>	.690	.664	.22810	2.217

a. Predictors: (Constant), Sasaran Anggaran, Kompetensi Petugas, Pengendalian Internal

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengolahan

Sumber: data hasil kuesioner diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R<sup>2</sup> atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,690, hal ini berarti bahwa kompetensi petugas, pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,690 atau 69,0 % sedangkan sisanya sebesar 0,310 atau 31,0 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian.

#### Uji Hipotesis

#### Uji T

Uji T untuk menentukan pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji T**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.935	.416		2.250	.030	
	KP	.221	.088	.316	2.502	.017	.525
	PI	.182	.174	.197	1.046	.302	.236
	KSA	.419	.154	.433	2.714	.010	.329

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengolahan

Sumber: data hasil kuesioner diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa : (1) H<sub>1</sub>: Kompetensi petugas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel, variabel kompetensi petugas mempunyai nilai signifikan 0.017. Hal ini berarti H<sub>1</sub> diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel kompetensi petugas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kompetensi petugas lebih kecil 0,05. (2) H<sub>2</sub>: Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel, variabel pengendalian internal mempunyai nilai signifikan 0.302. Hal ini berarti H<sub>2</sub> ditolak, sehingga dapat dinyatakan variabel pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pengendalian internal lebih besar 0,05. (3) H<sub>3</sub>: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel, variabel kompetensi petugas mempunyai nilai signifikan 0.010. Hal ini berarti H<sub>3</sub> diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kejelasan sasaran anggaran lebih kecil 0,05.

## Pembahasan

### Pengaruh Kompetensi Petugas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi petugas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa kompetensi petugas searah dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana semakin meningkatnya kompetensi petugas maka akan semakin meningkat juga akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kompetensi petugas mempunyai peran penting terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi petugas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H<sub>1</sub> diterima.

Kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya Rudana, 2005 (dalam Widyatama *et al.*, 2017:6). Dari persepsi responden dapat disimpulkan bahwa meskipun para petugas memiliki karakteristik 13 pendidikan rata – rata SMA, pemerintah daerah telah memberikan pelatihan berupa bimbingan secara teknis untuk meningkatkan pemahaman kepala desa dan PTPKD dalam melakukan pengelolaan dana desa. Dengan dilakukan pelatihan sangat membantu petugas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga laporan pengelolaan dana desa dapat disampaikan dengan tepat waktu.

### Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengendalian internal tidak

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak searah dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana semakin meningkatnya pengendalian internal maka akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak mengalami peningkatan dan pengendalian internal mempunyai peran yang tidak penting terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H<sub>2</sub> ditolak.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran searah dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana semakin meningkatnya kejelasan sasaran anggaran maka akan semakin meningkat juga akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kejelasan sasaran anggaran mempunyai peran penting terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H<sub>3</sub> diterima.

Kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya Rudana, 2005 (dalam Widyatama *et al.*, 2017:6). Dari persepsi responden dapat disimpulkan bahwa meskipun para petugas memiliki karakteristik 14endidikan rata - rata SMA, pemerintah daerah telah memberikan pelatihan berupa bimbingan secara teknis untuk meningkatkan pemahaman kepala desa dan PTPKD dalam melakukan pengelolaan dana desa. Dengan dilakukan pelatihan sangat membantu petugas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga laporan pengelolaan dana desa dapat disampaikan dengan tepat waktu.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa (1) Kompetensi petugas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2) Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah (1) Petugas pemerintahan desa yang bertugas dalam pengelolaan dana desa sebaiknya memiliki pengetahuan, keterampilan dan pelatihan, (2) Dalam penyusunan anggaran lebih jelas lagi dalam pengalokasian dananya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, S. R. 2003. *Kualitas Sumber Daya Manusia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Azhar, F. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar
- Dahlan, M. S. 2012. *Statistik Untuk Kedokteran Dan Kesehatan*. Salemba Medika. Jakarta.
- Direktorat jenderal perimbangan keuangan. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas dipenogoro. Semarang.
- Gumilar, I. 2007. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Manajemen*. Widyatama. Bandung.
- Hidayatullah, A. dan I. Herdjiono. 2014 *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke*. *Jurnal Unisbank* ISBN 978-979-3649-81-8.

- Hutapea, P. dan N. Thoha. 2008. *Kompetensi Komunikasi Plus : Teori, Desain, Kasus Dan Penerapan Untuk HR Dan Organisasi Yang Dinamis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Judarmita, I. N. dan N. L. Supadmi. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*: 21(3).
- Karmila, A. R. Tanjung Dan E. Darlis. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada Pemerintahan Riau). *Jurnal Sorot*: 9(1).
- Mada, S., L. Kalangi dan H. Gamaliel. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*: 8(2).
- Naimah. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Sagala, R. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Silalahi, E. B. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Solimun. 2005. *Analisis Multivariat Structural Equation Modeling (SEM)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Widyatama, A., L. Novita dan Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: 2(2).
- Wati, K. D., N. T. Herawati dan N. K. Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*: 2(1).
- Yesinia, N. I., N. C. Yuliarti dan D. Puspitasari. 2018. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*: 10(1).
- Yudianto, I. dan E. Sugiarti. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E Jurnal Universitas Padjadjaran*: 17(1).